RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan. Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut 10 Tahun 2016 tentang ketentuan Undang-Undang Nomor Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Untuk menyusun kebijakan rencana pembangunan tahunan daerah dimaksud, diperlukan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah pasca berakhirnya RPJMD Tahun 2018-2023.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan:

a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022;
c. Evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*;
d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selama periode tahun 2024-2026

Dalam hal ini, Rencana Stratgis (RENSTRA) Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 akan menjadi acuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berkesinambungan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan:
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
28. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang BAPANAS (Badan Pangan Nasional);
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
38. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8

Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
47. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana pogram dan kegiatan , serta pendaanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2025 adalah :

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;

c. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan (apabila ada);

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2. Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;
- 4.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

1. TUGAS POKOK

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.

2. FUNGSI

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

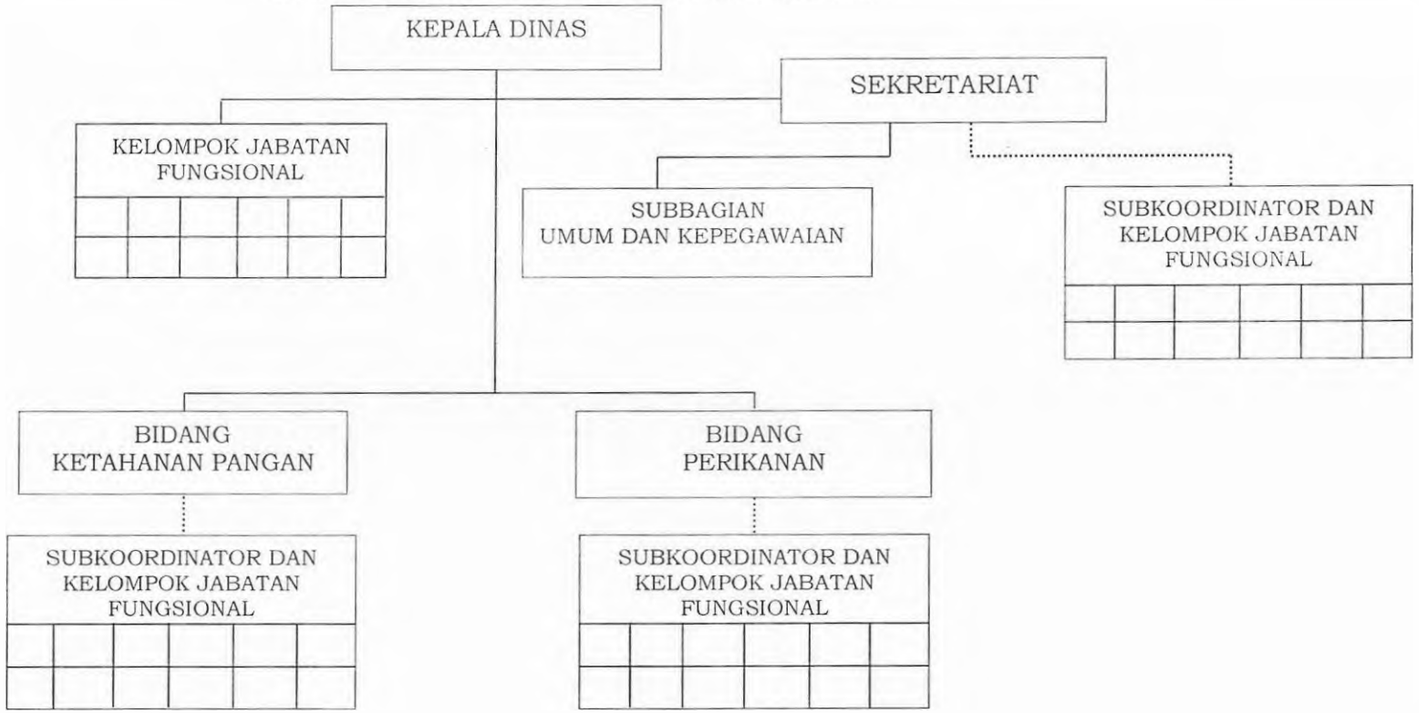
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

3. STRUKTUR ORGANISASI OPD

Adapun Struktur Organisasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



I. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.

1. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif fan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

   Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

   a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
   b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
   c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
   d. pembinaan aparatur;
   e. pengelolaan urusan kepegawaian;
   f. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
   g. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
   h. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
   i. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
   j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bidang Ketahanan Pangan

   Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi serta penganekaragaman pangan dan konsumsi.

   Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;
e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;
g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, keamanan pangan dan gizi, dan penganekaragaman pangan dan konsumsi;
h. penyiapan koordinasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
i. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
j. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan.

Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
c. pelaksanaan tugas pembinaan di bidang perikanan meliputi perikanan budidaya, penguatan daya saing produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pada Bulan Januari Tahun 2022 pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk sebanyak 25 orang ASN dan 20 orang Non ASN. Adapun rincian pegawai ASN adalah sebagai berikut :

Data pegawai menurut Pangkat dan Golongan adalah :

Tabel II.1
Data Jumlah Pegawai
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah PNS / CPNS	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1	0 Orang
2.	Pembina Tingkat I	(IV/b)	0	1 Orang
3.	Pembina	(IV/a)	2	1 Orang
4.	Penata Tingkat I	(III/d)	3	3 Orang
5.	Penata	(III/c)	2	1 Orang
6.	Penata Muda Tingkat I	(III/b)		- Orang
7.	Penata Muda	(III/a)	2	3 Orang
8.	Pengatur Tingkat I	(II/d)	2	4 Orang
9.	Pengatur	(II/c)		- Orang
10.	Pengatur Muda Tingkat I	(II/b)		- Orang
11.	Pengatur Muda	(II/a)		- Orang
12.	Juru Tingkat I	(I/d)		- Orang
13.	Juru	(I/c)		- Orang
14.	Juru Muda Tingkat	(I/b)		- Orang
15.	Juru Muda	(I/a)		- Orang
	JUMLAH		**12**	**13 Orang**

Data Pegawai menurut Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional adalah :

Gambar II.2
Data Jumlah Pegawai
Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

No.	Jabatan	Jumlah PNS / CPNS	
		Laki-laki	Perempuan
1.	**Struktural**		
	1. Eselon II	1	0 Orang
	2. Eselon III	0	2 Orang
	3. Eselon IV	1	0 Orang
2.	**Fungsional**		
	1.JFT	6	6 Orang
	2.JFU	4	5 Orang
	JUMLAH	**12**	**13 Orang**

Data pegawai menurut Tingkat Pendidikan adalah :

Gambar II.3
Data Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS / CPNS		
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Magister (S-2)	2	2	Orang
2.	Sarjana (S-1)	7	7	Orang
3.	Diploma IV (D-IV)		-	Orang
4.	Diploma III (D-III)	1	-	Orang
5.	Diploma II (D-II)	-	-	Orang
6.	Diploma I (D-I)	-	-	Orang
7.	SMA (Sederajat)	2	4	Orang
8.	SMP		-	Orang
9.	SD		-	Orang
	JUMLAH	**12**	**13**	**Orang**

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah tenaga Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk yang berstatus PNS pada tahun 2022 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Dilihat dari segi kuantitas pegawai PNS masih dikatakan kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang ditangani, sehingga perlu adanya tambahan tenaga dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui diklat teknis fungsional dan diklat lain yang mendukung pengembangan organisasi.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk menempati gedung dengan Luas bangunan yang 525 (lima ratus dua puluh lima) m^2 dan 1 (satu) gedung untuk pertemuan seluas 50 (lima puluh) m^2.

Sedangkan untuk mobilitas di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk, mobil dinas roda 4 (empat) yang ada sebanyak 5 (lima) unit dengan kondisi 4 (empat) unit dalam keadaan baik dan 1 (satu) unit dalam keadaan kurang layak sehingga perlu adanya penggantian mobil yang baru, prasarana kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor yang ada sebanyak 15 (lima belas) unit, yang semuanya dalam keadaan baik. Pembangunan Daerah tidak dapat terlepas dari

penyediaan sarana dan prasarana Daerah yang bersifat fisik. Tercukupinya penyediaan sarana dan prasarana pendukung akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi.

Secara keseluruhan, daftar aset Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.4
Daftar Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Tanah	4	Unit
2	Alat-alat angkutan	22	Unit
3	Alat-alat Pertanian/Peternakan	3	Unit
4	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	285	Unit
5	Alat-alat Studio dan Komunikasi	9	Unit
6	Alat-alat Laboraturium	51	Unit
7	Bangunan Gedung	30	Unit
8	Jalan dan Jembatan	1	Unit
9	Bangunan Air/Irigasi	11	Unit
10	Instalasi	2	Unit
11	Jaringan	3	Unit

Tabel II.4.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan akses pangan bagi masyarakat			Persentase ketersediaan pangan utama (%)	3,70	317,8	318,3	318,8	319,3	3.07	286,03	249,94	297,17	300,94	82,97	90,004	78,53	93,22	94,25
				Ketersediaan Energi dan Protein perkapita															
				- Ketersediaan Energi (kkal/kapita /hari)	4.490	4.010	3.530	3.049	2.569	4.981	4.010	4.352	3.597	3.061	110,93	112,25	123,29	117,97	119,15
				- Ketersediaan Protein (gram/ kapita/Hari)	195,1	172,7	150,3	128,0	105,6	287,1	264,7	171,9	142,34	118,6	147,15	153,27	114,37	111,20	112,31
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan non budidaya serta penyediaan sarana prasarana produksi perikanan dan pangsa pasar hasil produksi perikanan			Meningkatnya jumlah produksi : Perikanan Budidaya (ton)	11.785	11.820	11.835	11.844	11.858	9.101	12.957	9.486,3	10.011	11.050	77,26	109,62	80,15	84,52	92,8
				Perikanan Non Budidaya (ton)	656	674	655	666	678	599,7	627,70	611,7	628	651,850	91,42	93,13	93,38	94,29	96,1
				Jumlah Ikan dikonsumsi oleh Masyarakat (kg/kapita/ tahun)	22,45	25,05	26,00	26,35	27,12	22,68	27,66	26,00	29,87	31,33	101,02	110,41	100	113,35	115,52

Dari tabel diatas semua target indikator kinerja pelayanan Dnas Ketahanan pangan dan Perikanan telah tercapai sampai 2022. Hal yang perlu ditingkatkan adalah pemanfaatan sumber daya yang dihasilkan sehingga dapat bermanfaat secara merata bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih terdapat desa yang masuk kategori rawan pangan.

Tabel II.4.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	347.349.930	438.420.000	289.259.400	-	-	301.475.561	383.844.987	263.522.122	-	-	86,79	87,55	91,10	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	663.150.000	485.500.000	580.620.000	-	-	606.520.250	477.254.614	549.332.429	-	-	91,46	98,30	94,61	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	2.000.000	-	-	-	-	1.600.000	-	-	-	-	80,00	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	15.000.000	20.000.000	-	-	13.871.000	13.331.000	18.502.000	-	-	92,47	88,87	92,51	-	-
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	3.715.222.700	4.407.939.050	-	-	-	3.276.539.812	3.927.062.140	-	-	-	88,19	89,09
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	1.051.280.000	1.188.750.000	312.965.000	-	-	948.988.380	1.155.178.060	239.074.050	-	-	90,27	97,18	76,39	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-	-	-	179.081.350	3.283.825.000	-	-	-	176.453.159	3.279.850.308	-	-	-	98,53	99,88
8	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	-	-	697.585.650	398.248.300	-	-	-	692.362.400	185.768.250	-	-	-	99,25	46,65
9	Program Pengawasan Keamanan Pangan	-	-	-	43.535.000	23.026.000	-	-	-	36.430.050	21.766.910	-	-	-	83,68	94,53
10	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	260.000.000	1.098.495.000	1.482.100.000	-	-	248.319.250	1.063.687.750	1.397.480.155	-	-	95,51	96,83	94,29	-	-
11	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	205.000.000	143.055.000	-	-	-	154.683.000	69.572.500	-	-	-	75,46	48,63	-	-	-
12	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	435.000.000	400.000.000	-	-	-	402.888.000	393.210.000	-	-	-	92,62	98,30	-	-	-
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-
14	Program: Pengelolaan Perikanan Budidaya	-	-	-	1.144.440.000	329.016.500	-	-	-	1.143.635.000	322.540.000	-	-	-	99,93	98,03
15	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	-	-	46.230.000	41.253.000	-	-	-	39.747.500	38.495.500	-	-	-	85,98	93,32
16	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	-	-	189.020.000	271.305.000	-	-	-	188.281.400	260.719.550	-	-	-	99,61	96,10

Secara keseluruhan target capaian kinerja anggaran terealisasi dengan baik, dimana capaian penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 adalah 91,85 %

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel II.4.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	**Sangat Tinggi**
2.	**76% ≤ 90%**	**Tinggi**
3.	**66% ≤ 75%**	**Sedang**
4.	**51% ≤ 65%**	**Rendah**
5.	**≤ 50%**	**Sangat Rendah**

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dari tahun 2018-2022 dibandingkan dengan target di Renstra sudah tercapai. Hanya sebagian capaian kinerja dari kegiatan Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan pada sub kegiatan Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal belum tercapai maksimal, disebabkan karena dari dana DBHCHT yang direncanakan untuk kegiatan dalam bentuk penanaman sayuran dengan sistem Aquaponik yaitu penanaman sayuran kangkung dipermukaan dalam bes beton. Pertimbangan teknis dari praktisi hidroponik, dalam rincian penganggaran ada beberapa kebutuhan yang belum masuk didalam rincian penganggaran, dari sisi penyedia tidak mampu merakit satu paket kegiatan sesuai dengan rincian belanja yang ada, sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas maka dana DBHCHT tidak direalisasikan.

2.3 KINERJA PELAYANAN

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai motor penggerak sektor pertanian dan perikanan, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor pertanian dan perikanan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi pertanian dan perikanan Kabupaten Nganjuk. Untuk itu peran Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam perekonomian adalah dengan meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Ketersediaan dan Distribusi pangan masyarakat serta Produksi Perikanan.

Upaya pencapaian target TPB/SDG's menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan tingkat provinsi telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)" yang dijabarkan ke dalam enam misi yang selanjutnya diselaraskan dengan target TPB/SDG's

Sedangkan kegiatan saat ini pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memprioritaskan pada penanganan dampak ekonomi. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid -19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada Tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahkan daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2023.

Pandemi Covid-19 mengubah secara signifikan pola interaksi antar manusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan social distancing dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan

berlangsung dalam kehidupan era new normal, meskipun herd immunity diharapkan telah tercapai di Tahun 2023, penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada :

1. Penanganan Kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonomi;dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial.

Sedangkan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memprioritaskan pada penanganan dampak ekonomi, dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah.

A. BIDANG KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan serta mampu mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan Pangan merupakan suatu sistem pangan yang terdiri atas pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
   Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1.) Produksi dalam negeri; (2.) pemasokan pangan; dan (3.) pengelolaan cadangan pangan.

   Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pokok. Cadangan pangan pemerintah khususnya beras dikelola oleh Perum Bulog. Untuk cadangan pangan pemerintah daerah diatur Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, termasuk cadangan pangan pemerintah desa diatur pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang dan industri pengolahan. Penyelenggaraan penguatan cadangan pangan daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan mandiri.

Data Ketersediaan dan Cadangan Pangan disajikan pada tabel dibawah :

- TABEL II.5
NERACA PANGAN STRATEGIS
TAHUN 2022 PER 31 DESEMBER TAHUN 2022

No	Komoditas	Satuan	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca Kumulatif (Surplus/Defisit)
1.	Padi	Ton	71.454,83	10.563,41	60.891,43
2.	Jagung	Ton	80.252,15	6.608,94	73.643,22
3.	Kedelai	Ton	3.645,18	1.094,44	2.550,74
4.	Bawang Merah	Ton	91.267,31	263,25	91.004,06
5.	Bawang Putih	Ton	198,90	436,53	(237,63)
6	Cabe Besar	Ton	2.089,99	118,55	1.971,44
7.	Cabe Rawit	Ton	7.123,40	413,49	6.709,90
8.	Gula Pasir	Ton	14.177,23	1.070,54	13.106,69
9.	Minyak Goreng	Ton	960,00	1.021,01	(61,01)
10.	Daging Sapi	Ton	86,77	298,61	(211,84)
11.	Daging Ayam	Ton	181,79	487,61	(305,82)
12.	Telur	Ton	443,79	572,61	(128,81)

- TABEL II.6

DATA LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT (LPM)/LPMDES
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : NGANJUK

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Tahun Pembangunan	Sarana yang dimiliki (lantai jemur,dryer, RMU, lainnya*)
1	NGLUYU	Tempuran	Purwowidodo	2007	
2	GONDANG	Nglinggo	Marsudi Tani	2007	
3	GONDANG	Karangsemi	Sri Rejeki	2007	
4	SUKOMORO	Bagorwetan	Jogo Makmur	2007	Lantai Jemur
5	REJOSO	Klagen	Widodo	2007	
6	REJOSO	Wengkal	Margo Mulyo	2007	Lantai Jemur
7	REJOSO	Setren	Tani Rukun	2007	
8	LENGKONG	Bangle	Sumber Pagan	2007	
9	JATIKALEN	Jatikalen	Mekar Sari	2007	
10	JATIKALEN	Lumpangkuwik	Sido Dadi	2007	
11	BAGOR	Selorejo	Suko Widodo	2007	
12	WILANGAN	Wakung	Suko Widodo	2007	
13	SAWAHAN	Siwalan	Sido Asih	2007	
14	SAWAHAN	Bareng	Argo Dadi	2007	
15	PATIANROWO	Pisang	Sri Rejeki	2007	
16	PACE	Banaran	Rejo Mulyo	2007	RMU, L.Jemur
17	TANJUNGANOM	Sonobekel	Karya Usaha	2007	
18	BERBEK	Bulu	Prima Tani	2007	
19	NGETOS	Kuncir	Rukun Tani	2007	
20	LOCERET	Patihan	Tunas Harapan	2007	
21	NGRONGGOT	Kelutan	Tani Maju	2007	
22	BAGOR	Bagorkulon	Gunung Tani Jaya	2007	Lantai Jemur
23	REJOSO	Sidokare	Tani Makmur	2007	
24	REJOSO	Mungkung	Dewi Sri	2007	
25	WILANGAN	Mancon	Tani Makmur	2008	
26	LENGKONG	Sumbersono	Sumber Makmur	2008	
27	NGLUYU	Bajang	Upadi tani	2008	
28	NGLUYU	Gampeng	Sri Rahayu	2008	
29	NGLUYU	Gampeng	Sri Dewi	2008	
30	NGLUYU	Sugihwaras	Rukun Mulyo	2008	
31	NGLUYU	Tempuran	Tani Mulyo	2008	
32	NGLUYU	Ngluyu	Bina Taruna Tani	2008	
33	GONDANG	Senggowar	Dewi Sri	2008	
34	GONDANG	Balonggebang	Amanah Tani	2008	
35	TANJUNGANOM	Jogomerto	Rukun Santoso	2008	
36	REJOSO	Mlorah	Sido Mulyo	2008	
37	REJOSO	Klagen	Luhur	2008	
38	SUKOMORO	Nglundo	Sri Agung	2008	
39	JATIKALEN	Ngasem	Puji Rahayu	2008	
40	JATIKALEN	Dawuhan	Margo Makmur	2008	
41	JATIKALEN	Begendeng	Tani Mulyo	2008	
42	BAGOR	Karangtengah	Margo Basuki	2008	Lantai Jemur
43	REJOSO	Gempol	Tani Makmur	2008	
44	WILANGAN	Ngudikan	Kemakmuran	2008	
45	SAWAHAN	Margopatut	Sarisuci	2008	
46	PATIANROWO	Ngepung	Margo Rukun	2008	
47	PATIANROWO	Tirtobinangun	Margo Utomo	2008	
48	NGRONGGOT	Banjarsari	Serbaguna	2008	Lantai Jemur

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Tahun Pembangunan	Sarana yang dimiliki (lantai jemur,dryer, RMU, lainnya*)
49	NGRONGGOT	Betet	Harapanbaru	2008	Lantai Jemur
50	BERBEK	Sumberwindu	Sri Makmur	2009	Lantai Jemur
51	LOCERET	Sokorejo	Suko Maju	2009	Lantai Jemur
52	PACE	Kecubung	Tani Mulyo	2009	
53	REJOSO	Sidokare	Kemakmuran	2010	
54	REJOSO	Sambikerep	Rukun Tani	2010	
55	NGLUYU	Gampeng	Sri Sedono	2010	Lantai Jemur
56	JATIKALEN	Gondangwetan	Serba Usaha	2010	
57	GONDANG	Pandean	Puji Sri Mulyo	2010	
58	NGANJUK	Balongpacul	Tani Makmur	2010	
59	REJOSO	Ngangkatan	Pancasari	2010	
60	REJOSO	Mojorembun	Karya Abadi	2011	Lantai Jemur
61	NGRONGGOT	Cengkok	Tani Makmur	2011	
62	NGANJUK	Balongpacul	Budi Lestari	2011	Lantai Jemur
63	LOCERET	Candirejo	Ibu Bumi	2012	
64	NGLUYU	Lengkonglor	Sido Makmur	2012	
65	NGLUYU	Lengkonglor	Sri Makmur	2012	
66	BAGOR	Gandu	Karya Makmur	2013	Dreyer, RMU
67	BERBEK	Sendangbumen	Tani Mukmur	2013	Lantai Jemur
68	NGLUYU	Gampeng	Sembodo Tani	2013	
69	PACE	Jetis	Muji Subur	2013	
70	BERBEK	Tiripan	Tani Adil	2013	
71	NGLUYU	Ngluyu	Rukun Karya	2013	Lantai Jemur
72	REJOSO	Talang	Guyub R. Tani	2013	
73	LOCERET	Sombron	Sumber Rejeki	2013	Lantai Jemur
74	PRAMBON	Kurungrejo	Karya Makmur	2013	Lantai Jemur
75	REJOSO	Talun	Tri Agung T.M	2013	
76	LOCERET	Putukrejo	Bina Sejahtera	2013	Lantai Jemur
77	NGLUYU	Sugihwaras	Swasembada	2013	
78	PACE	Banaran	Sido Mulyo	2013	
79	LOCERET	Nglaban	Rukun Makmur	2014	
80	BERBEK	Sumberurip	Sumber Makmur	2014	Lantai Jemur
81	LENGKONG	Jatipungur	Rukun Tani	2014	
82	WILANGAN	Sudimoroharjo	Bahagia	2014	Lantai Jemur
83	PATIANROWO	Rowomarto	Tani Bagiyo Mulyo	2014	
84	BAGOR	Sekar Putih	Mulya Jaya	2014	Lantai Jemur
85	BERBEK	Ngrawan	Tani Makmur	2014	Lantai Jemur
86	PRAMBON	Singkalanyar	Tani Jaya	2014	
87	NGRONGGOT	Trayang	Sekar Tani	2014	
88	BARON	Mabung	Podo Rukun	2014	Lantai Jemur
89	LOCERET	Kwagean	Sumber Makmur	2014	L.Jemur, RMU
90	SUKOMORO	Sumengko	Suko Makmur	2015	
91	BAGOR	Kutorejo	Sumber Pangan	2015	
92	NGLUYU	Sugihwaras	Sekar Arum	2015	
93	BERBEK	Mlilir	Tri Mulyo Tani	2018	L.Jemur, RMU
94	NGLUYU	Ngluyu	Rukun Abadi	2019	Lantai Jemur
95	NGLUYU	Gampeng	Binar Tani	2019	
96	NGLUYU	Gampeng	Arum Dalu	2019	Lantai Jemur
97	NGLUYU	Gampeng	Guna Bahagia	2019	Lantai Jemur
98	LOCERET	Kenep	Sido Ayem	2021	Lantai Jemur, Rumah RMU dan Bed Dyer
99	LOCERET	Genjeng	Raharjo	2021	Lantai Jemur
100	LOCERET	Sekaran	Sri Sedono	2022	Lantai Jemur, Rumah RMU dan Bed Dyer

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Tahun Pembangunan	Sarana yang dimiliki (lantai jemur,dryer, RMU, lainnya*)
101	BERBEK	Mlilir	Tri Mulyo Tani	2022	Lantai Jemur, Rumah RMU dan Bed Dyer
102	BAGOR	Kendalrejo	Ngudi Rejeki	2022	Lantai Jemur, Rumah RMU dan Bed Dyer
103	TANJUNGANOM	kel. Tanjunganom	Tani Mulyo	2022	Lantai Jemur

2. Pelayanan Dasar Distribusi dan Akses pangan Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, sangat sulit diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan.

   Mengatasi masalah tersebut diatas, maka kegiatan distribusi pangan difokuskan pada kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM) bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan) Kebijakan yang mendasari kegiatan Penguatan-LDPM adalah penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya untuk petani di sentra produksi pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk (a) mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik, (b) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah dari hasil produksi untuk perbaikan pendapatan, (c) memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan Gapoktan agar dapat meningkatkan akses pangan bagi anggotanya pada saat paceklik.

3. Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, disamping juga efisiensi untuk mencegah pemborosan. Pola konsumsi pangan juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh (food utility) dapat optimal, dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral serta aman. Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Sebagai acuan kualitatif untuk konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), rata-rata per kapita perhari untuk energi 2.400 (dua ribu empat ratus) kilo kalori/kapita/hari dan protein 63 (enam puluh tiga) gram/kapita/hari, sedangkan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 (seratus) sebagai pola ideal.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Tabel II.7
Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2022

No.	Kontribusi	Energi (kkal/kap/hari)					Protein (gram/kap/hari)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hewani	690,32	471,20	498,70	4.208,20	4.084,38	96,17	51,73	57,01	110,69	118,98
2.	Nabati	4.850	3.408,75	4.352,50	504,29	213,15	138,64	95,65	114,93	57,65	36,48
3.	Total	5.540	3.879,94	4.851,20	4.712,50	4.297,53	234,82	147,38	171,95	168,34	155,46

4. Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan

Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi maupun **stunting**. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis) dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun sosial (transien). Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena; (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu kiranya dicari konsep-konsep penangannya yang efektif dan efisien sesuai situasi dan kondisi yang ada. Salah satu konsep tersebut adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data, informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

B. BIDANG PERIKANAN

Bidang Perikanan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk. Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan.

Berikut rekapitulasi data di Bidang Perikanan tahun 2018-2022 seperti pada tabel berikut:

Tabel II.8

Produksi Perikanan

No	Uraian Indikator Sasaran	satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	9.101	12.957	9.486,3	10.011	11.050
2	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Non Budidaya	Ton	599,7	627,70	611,7	628	651,850

Tabel II.9

Data Konsumsi Ikan Per Kapita

No	Tahun	Konsumsi Ikan (Kg/ Kapita/Tahun)
1.	2018	22,68
2.	2019	27,66
3.	2020	26
4.	2021	29,87
5.	2022	31,33

Tabel II.10

Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Nganjuk

No.	Kecamatan	Jumlah			
		2019	2020	2021	2022
1	Nganjuk	5	5	8	7
2	Wilangan	4	4	4	1
3	Bagor	4	4	7	3
4	Sukomoro	5	5	5	7
5	Rejoso	3	3	4	5
6	Pace	8	8	12	7
7	Jatikalen	6	6	6	5
8	Patianrowo	5	5	5	5
9	Ngluyu	1	1	0	0
10	Kertosono	10	10	10	12
11	Loceret	3	3	7	6
12	Berbek	16	16	13	7
13	Ngetos	3	3	7	3
14	Sawahan	7	8	9	4
15	Gondang	3	3	5	2
16	Ngronggot	21	21	28	22
17	Prambon	12	12	17	14
18	Lengkong	4	4	5	3
19	Tanjunganom	16	16	20	9
20	Baron	12	13	18	10
	Jumlah	**148**	**150**	**189**	**132**

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan Dinas Ketahanan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk guna koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara lain :

1. Bulog
2. Badan Pusat Statistik (BPS)
3. Dinas Perindag
4. Dinas PMPTSP
5. Dinas Pertanian
6. Dinas Kesehatan

2.5 MITRA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK DALAM PEMBERIAN LAYANAN

Mitra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dalam pemberian layanan antara lain :

1. Penggilingan padi
2. Petani produsen
3. Badan Pengawas obat dan makanan (BPOM)
4. UMKM pengolah produk pangan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan konstribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi saat ini. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nganjuk. Penyajian analisis isu-isu strategis diharapkan dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Nganjuk. Penyajian isu-isu strategis RPJMD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah :

1. Belum optimalnya pola konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
2. Masih Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras
3. Masih banyaknya pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan yang tidak layak konsumsi
4. Belum optimalnya sistem untuk mendeteksi kerawanan pangan

5. Jumlah Produksi Ikan konsumsi belum optimal
6. Masih tingginya Harga pakan ikan di pasaran
7. Kurangnya Ketersediaan bibit ikan
8. Teknologi budidaya perikanan masih rendah
9. Perubahan Iklam ekstrim
10. Banyak Pembudidaya Ikan merugi sehingga tidak melanjutkan usaha budidaya /ganti komoditas ikan lainnya
11. Terbatasnya atau Kurangnya Sumber Permodalan untuk Usaha di Bidang Perikanan
12. Belum Optimalnya Implementasi Sistem Informasi dan Data melalui Teknologi Informasi
13. Pengelolaan Hasil Perikanan Kurang Maksimal

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sarana Pembangunan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
	Belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Belum Optimalnya Ketersediaan Pangan Utama	Belum optimalnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dalam pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
		Belum optimalnya pola konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
		Masih adanya pangan segar tidak aman dikonsumsi yang beredar di masyarakat	Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar
		Masih adanya daerah rawan pangan	Rendanya akses pangan di tempat dan kondisi tertentu
		Belum Optimalnya Jumlah Produksi Ikan	Masih kurangnya penerapan teknologi terbaru tentang cara pembudidayaan ikan yang baik (CPIB) dan Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana hasil Perikanan
		Masih Kurangnya Ketersediaan bibit ikan unggul	Belum optimalnya penerapan cara pembenihan ikan yang baik
		Belum Optimalnya Pertumbuhan Produksi Komoditas di Sektor Perikanan	Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha perikanan
		Belum optimalnya produksi ikan tangkap di perairan umum	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menangkap ikan secara ramah lingkungan
		Masih rendahnya angka konsumsi ikan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan

3.2 TELAAHAN RPJMN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RPJMD PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

3.2.1 RPJMN Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah "TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG". Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni "PERTANIAN YANG MAJU, MANDIRI DAN MODERN UNTUK TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG".

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta,
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, sehingga ditetapkannya Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

3.2.2 RPJMN Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2020-2024

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan visi Kelautan dan Perikanan Jangka Menengah 2020-2024 yakni "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG SEJAHTERA DAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN GOTONG ROYONG".

Sesuai misi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki misi yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
   Melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
   Melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;

3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
   Melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
   Melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

3.2.3 RPJMD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Visi Pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah, "TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG".

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Timur periode tahun 2019 – 2024 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, serta mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, maka pembangunan pertanian guna mewujudkan

Ketahanan Pangan mendukung misi pertama, "MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI, BAIK ANTAR KELOMPOK, ANTAR SEKTOR DAN KETERHUBUNGAN WILAYAH".

3.2.4 RPJMD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Visi pembangunan daerah Provinsi JAWA TIMUR untuk periode RPJMD 2019-2024 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut : TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG.

Visi dari Kementerian Kelautan Perikanan adalah "Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.

MISI : Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan antar wilayah (spatial policy) didukung keterhubungan antar zona.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur adalah :

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan

Sasaran :

1. Meningkatnya nilai tambah sub kategori perikanan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Strategi :

1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya
2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap
3. Meningkatkan produksi olahan dan akses pasar
4. Meningkatkan pemanfaatan ruang laut sesuai zonasi dengan teknologi tepat guna
5. Meningkatkan pelayanan pengujian mutu dan pengembangan produk hasil perikanan
6. Meningkatkan produksi benih ikan air payau dan laut

7. Meningkatkan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan
8. Meningkatkan kompetensi pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan
9. Meningkatkan luasan rehabilitasi ekosistem kelautan dan perikanan
10. Meningkatkan pelayanan pelabuhan perikanan
11. Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya di Jawa Timur
2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap di Jawa Timur dan meningkatkan pendapatan
3. Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan
4. Meningkatkan pemanfaatan ruang laut melalui kemitraan strategis dalam pengembangan dan penyebarluasan teknologi hasil kelautan dan perikanan
5. Meningkatkan produk hasil perikanan yang bersertifikat mutu
6. Meningkatkan pelayanan pelaku usaha pembudidaya ikan Jawa Timur
7. Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang terakses pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan
8. Meningkatkan pelayanan pelatihan teknis pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan di Jawa Timur
9. Mengendalikan sumber daya kelautan dan perikanan
10. Meningkatkan pelayanan pelabuhan perikanan di Jawa Timur
11. Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN Dinas Kelautan dan Perikanan

Telaahan RPJMN Kementerian/Lembaga dan RPJMD SKPD Provinsi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD Kabupaten terhadap terhadap sasaran RPJMN Kementerian/Lembaga dan RPJMD SKPD Provinsi tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk melakukan progam dan kegiatan telah sesuai dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.3.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 02 tahun 2021 Tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nganjuk tahun 2021-2041 Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pengendalian kawasan Agropolitan, perwujudan kawasan permukiman perdesaan, kawasan pertanian meliputi :

a. Penetapan, Pemetaan dan Identifikasi lahan sawah yang beririgasi teknis untuk mendukung program Ketahanan Pangan Nasional;
b. Pengaturan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha Pertanian;
c. Pengkajian Potensi Komoditas Agrobisnis yang memiliki nilai ekonomi tinggi, penetapan kawasan agrobisnis dan pengembangan pengelolaan sistem pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
d. Menyediakan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong Kawasan Permukiman Perdesaan.

3.4 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis urusan pangan serta kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Peningkatan diversifikasi pangan
2. Pengendalian keamanan pangan
3. Optimalisasi Ketersediaan Pangan Utama
4. Peningkatan pemenuhan angka kecukupan gizi
5. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pangan memenuhi kriteria B2SA (Beragam, bergizi seimbang dan aman)
6. Peningkatan angka konsumsi ikan
7. Penerapan teknologi terbaru tentang budidaya ikan
8. Pemenuhan Kebutuhan sarana dan pra sarana budidaya perikanan
9. Peningkatan Kapasitas Pokdakan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten Nganjuk secara umum, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk pada khususnya dalam keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Nganjuk tahun 2024–2026 adalah: Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan Daerah.

4.2 Sasaran

Sasaran pada urusan ketahanan pangan dan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

Sasaran : Mewujudkan Pemenuhan Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
Melalui indikator :

1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama
2. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Sasaran : Mewujudkan produksi perikanan budidaya dan non budidaya serta pemenuhan konsumsi ikan
Melalui Indikator :

1. Jumlah Produksi Ikan Budidaya dan non Budidaya
2. Peningkatan Angka konsumsi ikan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel IV.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasarn		
					2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan Daerah		Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,2	88	89	90
		1. Mewujudkan Pemenuhan Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	1.Persentase Ketersediaan Pangan Utama Rumus : Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun) x 100% Rata2 Konsumsi Pangan Utama (kg/kapita/tahun)	Persen	300,94	204,77	205,46	206,96
			2.Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Rumus : a. Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari) : Ketersediaan pangan/kapita/hari x kandungan kalori x BDD / 100	Kkal/ kapita/hari	3.061	3.050	2.905	2.809
			b. Ketersediaan protein (gram/kapita/hari) : Ketersediaan pangan/kapita/hari x kandungan protein x BDD / 100	Gram/ kapita/hari	118,6	117,5	115,3	110,7

PAGU KOORDINASI

No.	Perihal / Paraf		Tgl.
1.	Kabid Perdaha		14/4 23
2.	SEKDIN		14/4 23
3.	Kabid PSDAIK		14/4 23
4.			
5.			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasarn		
					2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Mewujudkan Perikanan Budidaya dan Non Budidaya serta Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	1. Jumlah Produksi Ikan Budidaya dan Non Budidaya (Ton)	Ton	11.701,85	11.155	11.419	11.435
			2. Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	%	4,89	0,54	4,76	6,06

Keterangan :

1. Standar kecukupan protein berdasarkan kaidah gizi sehat adalah sebesar 63 gram perkapita/hari sedangkan standar kecukupan energi berdasarkan kaidah gizi sehat adalah sebesar 2.400 kkal perkapita/hari. Dengan demikian perencanaan target kinerja kedepan adalah menuju pada kondisi ideal tersebut.
2. Target Ketersediaan Pangan Utama pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan formula perhitungan, dimana formula perhitungan tahun 2022 adalah :

   Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg) x 100%

   Jumlah Penduduk

   Formula tersebut belum menggambarkan kondisi ketersediaan Pangan berdasarkan Rata-rata Konsumsi Pangan Masyarakat Kabupaten Nganjuk.

PARAF KOORDINASI

	Paraf	Tgl.
SEKDIN		14/4
Kabid		14/4
PSDAIK		14/4
4.		
5.		

TABEL IV.2
Kerangka Logis, Cascading dan Crosscutting Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta Proses Bisnis

- IV.2.1. Kerangka Logis, Cascading dan Crosscutting Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Meningkatnya Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi Dinas	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
								Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
								Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
								Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
								Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	TerlaksananyaPendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
								Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Teredianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksaanya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanaya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Mewujudkan Pemenuhan Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi,Seimbang dan Aman	1. Keteresdiaan Pangan Utama 2. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita - Ketersediaan Energi - Ketersediaan Protein	PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pemenuhan Infrastruktur yang berfungsi dalam mendukung Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan dan Ketersediaan Pangan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia
								Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia
								Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
								Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
								Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan
				PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi Pangan Lokal	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah ketersediaan pangan yang tersedia	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
								Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
								Pemantauan Stock, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
								Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan
								Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan
						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
								Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota
								Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota
						Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rawan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Wilayah Rawan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan
						Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Penanganan Kerawanan Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
								Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Sampel Pangan Aman yang dikonsumsi	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Aman Pangan	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
								Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
								Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
		Mewujudkan Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya serta Pemenuhan Konsumsi Ikan	1. Jumlah Produksi Ikan Budidaya dan Non Budidaya (Ton) 2. Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAPDAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Sampel Pangan Aman yang dikonsumsi	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Non Budidaya	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
								Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia
								Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia
						Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil ysng Meningkat Kapasitasnya
								Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
								Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan , bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
						Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Data Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
								Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau Tenaga Kerja	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
						Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang mengikuti Pengembangan Kapasitas
								Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
								Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang Terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya
								Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
						Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan
								Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
								Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
								Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

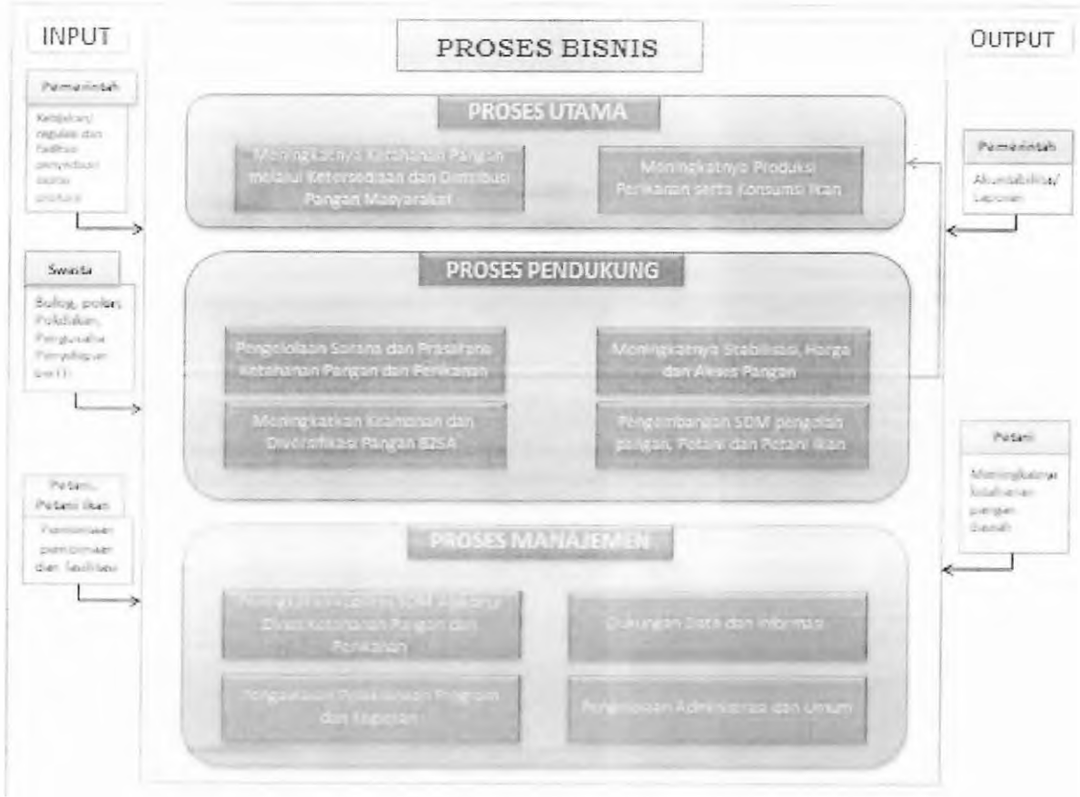
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
								Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan
								Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat
								Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi
								Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudayaan Ikan di Darat
				PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelanggaran yang ditangani	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang sudah menerima sosialisasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
								Pengawasan Usaha Perikanan bidang Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan usaha Perikanan bidang pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota
				PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro dan Kecil	Tersedianya Data AKI dan Data Informasi Usaha Pemasaran	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko
						Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tercapainya Kelompok yang sudah mendapatkan Sosialisasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pemberian Fasilitas bagi Pelak Usaha	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota
								Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan sekala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi

4.2 Kerangka Logis, Cascading dan Croascutting Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis

- IV.2.1. Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai *(strategy objective)*. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pembangunan daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja; strategi harus dikendalikan dan dievaluasi *(learning process)*.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

5.1 Strategi

a. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi dalam meningkatkan Budidaya Perikanan secara berkelanjutan serta meningkatkan upaya Ketersediaan dan Keamanan Pangan.
b. Peningkatan ketrampilan, teknologi proses dan jaringan distribusi serta menyediakan fasilitas, konsultasi dan informasi bagi usaha Perikanan.
c. Mengembangkan sentra-sentra Perikanan Budidaya dan Non Budidaya.

d. Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan SDM yang ada, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi melalui kesempatan pendidikan dan pelatihan.
e. Mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru.
f. Mengoptimalkan pemantapan kelembagaan pangan, sehingga Bidang Ketahanan Pangan dapat berjalan secara optimal.
g. Mengisi Tenaga yang berkompeten dibidang Pangan, Gizi dan Perikanan.
h. Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Perikanan dan Pangan ditingkat pedesaan, antara lain melalui pinjaman modal.
i. Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pangan dan Perikanan ditingkat rumah tangga, baik melalui penyuluhan maupun pelatihan, serta melalui pengembangan program Desa Mandiri Pangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan.
j. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penganekaragaman pangan, Gemarikan melalui pelatihan kepada ibu-ibu PKK dan kelompok Wanita Tani maupun UKM, serta Lomba Cipta Menu Penganekaragaman Pangan.
k. Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Keuangan yang tepat waktu dan akuntabel.
l. Mengikutsertakan Aparatur yang berkompeten dalam berbagai diklat dan penekanan penerapan Good Governance.
m. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha Perikanan dan Ketahanan Pangan
n. Meningkatkan kemampuan pemenuhan konsumsi dan keamanan pangan
o. Mengembangkan sektor usaha mikro, industri, pengolah hasil perikanan

5.2 Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 2024-2026 :

a. Meningkatkan kondisi kecukupan ketersediaan pangan, ikan sehingga mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatnya konsumsi ikan.
b. Meningkatkan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan serta Ikan bagi masyarakat.
c. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan bagi setiap Rumah Tangga dalam jumlah mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan berimbang.
d. Meningkatkan Pengawasan terhadap Keamanan Pangan segar serta meningkatkan mutu dan Kualitas Pangan.
e. Mengoptimalkan Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan, Pemasar, Kelompok Masyarakat dan Kelompok Tani.
f. Peningkatan Fungsi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar (PBAT) Warujayeng yang ada dalam upaya memenuhi ketersediaan benih ikan air tawar, dan perairan umum melaluli penebaran benih (Restocking) serta untuk memenuhi kebutuhan benih bagi kelompok pembudidaya ikan.
g. Meningkatkan Disiplin Aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat
h. Peningkatan ketersediaan dan penganekaragaman konsumsi pangan Daerah.

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

Tujuan RPD :	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemerataan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.		
Sasaran RPD :	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan Daerah	Meningkatkan reformasi birokrasi perangkat daerah	Penguatan kelembagaan	1. Penataan Sumber Daya Manusia 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja 3. Meningkatkan Pelayanan Publik
	Mewujudkan Pemenuhan Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1. Pemenuhan infrastruktur yang berfungsi dalam mendukung kemandirian pangan 2. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan dan masyarakat 3. Penanganan kerawanan pangan 4. Optimalisasi pengawasan keamanan pangan	1. Penyediaan infrastuktur pendukung kemandirian pangan 2. Optimalisasi cadangan pangan masyarakat dan pemerintah 3. Mengembangkan produk pangan alternatif 4. Meningkatkan kreatifitas masyarakat untuk menemukan & mengembangkan produk-produk unggulan baru 5. Meningkatkan Desa Tahan Pangan 6. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan 7. Meningkatnya bahan pangan yang diawasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			8. Inovasi pengolahan produk pangan sehingga memiliki branding yang dikenal & disukai masyarakat
	Mewujudkan Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya serta Pemenuhan Konsumsi Ikan	1. Mengembangkan perikanan budidaya dan non budidaya 2. Meningkatkan pengendalian dan penanganan pelanggaran perikanan 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 4. Mengembangkan usaha di bidang perikanan	1. Peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan serta pengolahan ikan 2. Pendampingan pengembangan usaha di bidang perikanan 3. Pengawasan dan pengendalian pendayagunaan sumber daya perikanan 4. Peningkatan promosi konsumsi ikan

BAB VI

PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

Mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Nganjuk, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 -2026 terdiri dari program – program yang menunjang tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan antara lain :
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
      a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
      c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
      d Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
      e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
      f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
      a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      c Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD
      d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      e Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
      f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
      g Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

b Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
   a Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
   b Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   c Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   d Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   e Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
   f Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
   a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   g Fasilitasi Kunjungan Tamu
   h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   i Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
   a Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c Pengadaan Mebel
   d Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
   a Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan antara lain :
   a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c Pemeliharaan Mebel
   d Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan kegiatan antara lain :
   1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan antara lain :
      a Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
      b Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
      c Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
      d Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik
      e Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

C. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan antara lain :
   1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan antara lain :
      a Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
      b Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
      c Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
      d Pemantauan Stock, Pasokan dan Harga Pangan

e Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Distribusi Pangan

f Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat

2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan antara lain :
   a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
   b Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
   c Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan sub kegiatan antara lain :
   a Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun
   b Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

D. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan antara lain :
   1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dengan sub kegiatan antara lain :
      a Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
   2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan antara lain :
      a Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
      b Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan antara lain :
   1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan antara lain :
      a Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

b Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

c Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

F. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan antara lain :
   a Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
   b Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
   a. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

G. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, dengan sub kegiatan antara lain:
   a Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan sub kegiatan antara lain :
   a Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   b Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   c Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   d Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   e Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat
   f Perencanaan Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
   g Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

H. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan antara lain :
   a Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

I. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Mikro dan Kecil, dengan sub kegiatan antara lain :
   a Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan sub kegiatan antara lain :
   a Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan antara lain :
   a Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   b Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Sekala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
												Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
												2024		2025		2026					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													**10.130.074.135**		**10.322.675.618**		**10.519.129.130**				
Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan Daerah	**Mewujudkan Pemenuhan Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)**	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	**2**	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai Sakip DKPP**	**Nilai**	**74,00**	**80,05**	**7.000.000.000**	**80,10**	**7.000.000.000**	**80,15**	**7.000.000.000**	**80,15**	**21.000.000.000**	**Sekretariat**	**Dinas KPP**
			2	**09**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD yang tersusun**				**66.074.135**		**66.074.135**		**66.074.135**		**198.222.405**	**Sekretariat**	**Dinas KPP**
			2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	**30.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP

PARAF KOORDINASI

No.	Paraf		Tgl
1.	Kabid Pendata		14/4 23
2.	SEKDIN		14/4 23
3.	Kabid PSDAIK		14/4 23
4.			
5.			

			2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	**15.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Dokumen	1	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	**30.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA –SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	Dokumen	1	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	**30.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	Dokumen	1	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	**30.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	11.074.135	3 Laporan	11.074.135	3 Laporan	11.074.135	3 Laporan	**33.222.405**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	**30.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	**09**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**Dokumen**	**4 Dokumen**	**12 Dokumen**	**4.688.636.000**	**12 Dokumen**	**4.688.636.000**	**12 Dokumen**	**4.688.636.000**	**12 Dokumen**	**14.065.908.000**	Sekretariat	Dinas KPP

PARAF KOORDINASI

No.	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendidikan	14/4 23
2.	SEKDIN	14/4 23
3.	Kabid PSDAIK	14/4 23
4.		
5.		

			2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25 orang/bulan	30 orang/ bulan	4.656.636.000	30 orang/ bulan	4.656.636.000	30 orang/ bulan	4.656.636.000	30 orang/ bulan	**13.969.908.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20	20 Dokumen	5.000.000	20 Dokumen	5.000.000	20 Dokumen	5.000.000	20 Dokumen	**15.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan SKPD	Dokumen	1	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	**15.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	**18.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	**15.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/	Laporan	6 Laporan	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	**18.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/	Dokumen	1	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	**15.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	**09**	**01**	**2.03**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun**		**2**	**3 Laporan**	**15.000.000**	**3 Laporan**	**15.000.000**	**3 Laporan**	**15.000.000**	**3 Laporan**	**45.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP

PARAF KOORDINASI

No.	Jabatan	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendata		14/4 23
2.	SEKDIN		14/4 23
3.	Kabid PSDAIK		14/4 23
4.			
5.			

			2	09	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	**30.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	**15.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	**09**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**Paket**	**25 Pegawai**	**30 Paket**	**52.000.000**	**30 Paket**	**52.000.000**	**30 Paket**	**52.000.000**	**30 Paket**	**156.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1 Unit	6.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	**18.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25 Pegawai	30 Paket	10.000.000	30 Paket	10.000.000	30 Paket	10.000.000	30 Paket	**30.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	**9.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	**9.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	**30.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	20 Orang	20.000.000	20 Orang	20.000.000	20 Orang	20.000.000	20 Orang	**60.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP

KOORDINASI

	Konsep	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendata		14/4 23
2.	SEKDIN		14/4 23
3.	Kabid PSDAEK		14/4 23
4.			
5.			

			2	**09**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan**	**Laporan**	**13**	**17 Laporan**	**302.000.000**	**17 Laporan**	**302.000.000**	**17 Laporan**	**332.000.000**	**17 Laporan**	**936.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	**30.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	**30.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	**15.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang isediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	**360.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	37.000.000	1 Paket	**51.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	**30.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	**75.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100.000.000	30 Laporan	100.000.000	30 Laporan	100.000.000	30 Laporan	**300.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	**45.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP

PARAF KOORDINASI

No. Paraf

Kabid Pendata 14/4 23

SEKDIN 14/4 23

Kabid PSDAIK 14/4 23

			2	**09**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diadakan**	**Unit**	**25**	**31 Unit**	**1.700.000.000**	**31 Unit**	**1.892.601.483**	**31 Unit**	**1.892.601.483**	**31 Unit**	**5.485.202.966**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1 Unit	800.000.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	**2.400.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	10	10 Unit	700.000.000	10 Unit	700.000.000	10 Unit	700.000.000	10 Unit	**2.100.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	10 Unit	50.000.000	10 Unit	92.601.483	10 Unit	92.601.483	10 Unit	**235.202.966**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	10 Unit	150.000.000	10 Unit	300.000.000	10 Unit	300.000.000	10 Unit	**750.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	**09**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**Laporan**	**26 Laporan**	**26 Laporan**	**536.364.000**	**26 Laporan**	**536.364.000**	**26 Laporan**	**536.364.000**	**26 Laporan**	**1.609.092.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4.500.000	3 Laporan	4.500.000	3 Laporan	4.500.000	3 Laporan	**13.500.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan dan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	**300.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	20 Laporan	21 Laporan	431.864.000	21 Laporan	431.864.000	21 Laporan	431.864.000	21 Laporan	**1.295.592.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	**09**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Jumlah barang milik Daerah SKPD yang dipelihara**	**Unit**	**14 Unit**	**14 Unit**	**270.000.000**	**14 Unit**	**270.000.000**	**14 Unit**	**436.453.512**	**14 Unit**	**976.453.512**	Sekretariat	Dinas KPP

PASAT KOORDINASI
Tgl.
Kabid Perdakel 14/4/23
SEKDIN 14/4/23
Kabid PSDAIK 14/4/23

								Daerah												
			2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	**240.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3 Unit	3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	3 Unit	100.000.000	3 Unit	**300.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang Dipelihara	Unit	5 Unit	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	**15.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4 Unit	4 Unit	15.000.000	4 Unit	15.000.000	4 Unit	15.000.000	4 Unit	**45.000.000**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	70.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	166.453.512	1 Unit	**306.453.512**	Sekretariat	Dinas KPP
			2	09	02			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Pemenuhan Infrastruktur yang Berfungsi dalam Mendukung Kemandirian Pangan.**	%	97,16%	98,11%	1.310.000.000	99,05%	1.310.000.000	100%	1.310.000.000	100%	**3.930.000.000**	**Bidang Pangan**	**Dinas KPP**

PARAF KOORDINASI
No. Par... Tgl.
1. Kabid Perdalin 14/4 23
2.
3.
4.
5.

SEKRETARIS 14/4 23
Kabid PSDAIK 14/4 23

			2	**09**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan dan Ketersediaan Pangan**	**Unit**	**6 Unit**	**9 Unit**	**1.310.000.000**	**9 Unit**	**1.310.000.000**	**9 Unit**	**1.310.000.000**	**9 Unit**	**3.930.000.000**	**Bidang Pangan**	**Dinas KPP**
			2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	4 Unit	3 Unit	600.000.000	3 Unit	600.000.000	3 Unit	600.000.000	3 Unit	**1.800.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	2 Unit	4 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	4 Unit	**600.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Unit	1 Paket	2 Unit	500.000.000	2 Unit	500.000.000	2 Unit	500.000.000	2 Unit	**1.500.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
								Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	1	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000		5.000.000		**15.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
								Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan	Dokumen	1	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	**15.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
		Ketersediaan Energi dan Protein	**2**	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Diversifikasi Pangan Lokal**	%	100%	100%	1.040.000.000	100%	1.040.000.000	100%	1.040.000.000	100%	3.120.000.000	Bidang Pangan	Dinas KPP

PARAF KOORDINASI

No.	Per...	Tgl.
1.	Kabid Pendidikan	14/4 '23
2.	SEKDIN	14/4 '23
3.	Kabid PSDAIK	14/4 '23
4.		
5.		

			2	**09**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah ketersediaan pangan yang tersedia**	**Laporan**	**20 Kecamatan**	**1 Laporan**	**170.000.000**	**1 Laporan**	**170.000.000**	**1 Laporan**	**170.000.000**	**1 Laporan**	**510.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	**60.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	20 Kecamatan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	**180.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	**30.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stock, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	**60.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	1	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	**90.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	1	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	**90.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	**09**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota**	**Ton**	**3 Gapoktan (Pembinaan Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat)**	**115 Ton**	**740.000.000**	**115 Ton**	**740.000.000**	**115 Ton**	**740.000.000**	**115 Ton**	**2.220.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP

PARAF KOORDINASI

Kabid Pendaftaran 14/4 '23

Sekdin 14/4 '23

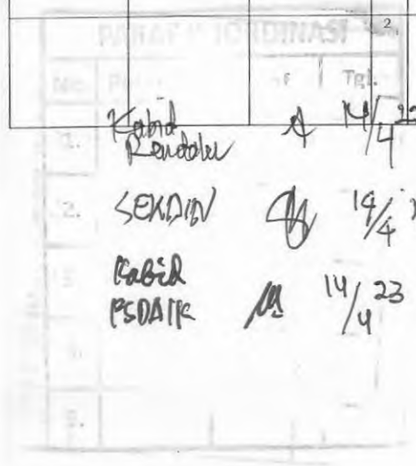
Kabid PSDAIK 14/4 '23

			2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	**90.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Ton	0	80 Ton	500.000.000	80 Ton	500.000.000	80 Ton	500.000.000	80 Ton	**1.500.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Ton	3 Gapoktan (Pembinaan Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat)	35 Ton	210.000.000	35 Ton	210.000.000	35 Ton	210.000.000	35 Ton	**630.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	**09**	**03**	**2.04**		**Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Jumlah Angka Kecukupan Gizi**	**Dokumen**	2 (Dua) Buku (NBM-PPH)	**1 Dokumen**	**130.000.000**	**1 Dokumen**	130.000.000	**1 Dokumen**	**130.000.000**	**1 Dokumen**	**390.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	2 (Dua) Buku (NBM-PPH)	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	**90.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	**300.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	04			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Desa Rawan Pangan**	%	0	9,09%	**70.000.000**	8,33%	**70.000.000**	7,57%	**70.000.000**	7,57%	**210.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	**09**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Wilayah Rawan Pangan**	**Dokumen**	1	**1 Dokumen**	**30.000.000**	**1 Dokumen**	**30.000.000**	**1 Dokumen**	**30.000.000**	**1 Dokumen**	**90.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP

PARAF KOORDINASI

No	Pejabat		
1.	Kabid Perdagangan		14/4 '23
2.	SEKDIN		14/4 '23
3.	KaBid PSDA-IK		14/4 '23
4.			
5.			

			2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	1	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	**90.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	**09**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Evaluasi Penanganan Kerawanan Pangan**	**Laporan**	**1**	**1 Laporan**	**40.000.000**	**1 Laporan**	**40.000.000**	**1 Laporan**	**40.000.000**	**1 Laporan**	**120.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	**30.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	**90.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Sampel Pangan Aman yang dikonsumsi**	**%**	**100%**	**100%**	**80.000.000**	**100%**	**80.000.000**	**100%**	**80.000.000**	**100%**	**240.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	**09**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sampel Aman Pangan**	**Sampel**	30 (Tiga Puluh) Sampel, satu Sosialisasi Keamanan Pangan	**30**	**80.000.000**	**30**	**80.000.000**	**30**	**80.000.000**	**30**	**240.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Sertifikat	30 (Tiga Puluh) Sampel, satu Sosialisasi Keamanan Pangan	10 Sertifikat	30.000.000	10 Sertifikat	30.000.000	10 Sertifikat	30.000.000	10 Sertifikat	**90.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP



Kabid Ketahanan 14/4 23

SEKDIN 14/4 23

Kabid PSDAIK 14/4 23

			2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	**90.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
			2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	10 Dokumen	20.000.000	10 Dokumen	20.000.000	10 Dokumen	20.000.000	10 Dokumen	**60.000.000**	Bidang Pangan	Dinas KPP
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													**2.500.000.000**		**2.500.000.000**		**2.500.000.000**		**7.500.000.000**	**Dinas KPP**
	Mewujudkan Produksi Perikanan Budidaya dan non Budidaya serta Pemenuhan Konsumsi Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya	**3**	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Produksi Perikanan Non Budidaya**	%	96,1%	96,38%	190.000.000	96,38%	190.000.000	96,69%	190.000.000	96,69%	570.000.000	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	**25**	**03**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Produksi Perikanan Non Budidaya**	**Kg**	**0**	**250 Kg**	**130.000.000**	**255 Kg**	**130.000.000**	**260 Kg**	**130.000.000**	**260 Kg**	**390.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	**90.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP

PARAF KOORDINASI

		Paraf	Tgl
1.	Kabid Perikanan		14/4 23
2.	SEKDIN		14/4 23
3.	Kabid PSDAIK		14/4 23
4.			
5.			

			3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Dokumen	0	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	4 Unit	100.000.000	4 Unit	**300.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	**25**	**03**	**2.03**		**Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Jumlah Data Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Layanan	0	**1**	**60.000.000**	**1**	**60.000.000**	**1**	**60.000.000**	**1**	**180.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	0	1 Layanan	60.000.000	1 Layanan	60.000.000	1 Layanan	60.000.000	1 Layanan	**180.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	25	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Produksi Perikanan Budidaya**	%	92,8%	93,1%	1.230.000.000	93,52%	1.230.000.000	94,4%	1.230.000.000	94,4%	**3.690.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	**25**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**Ton**	13 Pokdakan	**5.900 Ton**	**100.000.000**	**6.378 Ton**	**100.000.000**	**7.250 Ton**	**100.000.000**	**7.250 Ton**	**300.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	0	10 Kelompok	100.000.000	10 Kelompok	100.000.000	10 Kelompok	100.000.000	10 Kelompok	**300.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	**25**	**04**	**2.04**		**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	%	20 Kecamatan	**100 %**	**1.130.000.000**	**100 %**	**1.130.000.000**	**100 %**	**1.130.000.000**	**100 %**	**3.390.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen	20 Kecamatan	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	**90.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Unit	3	48 Unit	500.000.000	48 Unit	500.000.000	48 Unit	500.000.000	48 Unit	**1.500.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP

KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perikanan		14/4 23
2.	SEKDIN		14/4 23
3	Kabid PSDAIK		14/4 23
4.			

			3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Unit	0	8	300.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	8	**900.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	**300.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	Orang	0	60 Orang	200.000.000	60 Orang	200.000.000	60 Orang	200.000.000	60 Orang	**600.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase Pelanggaran yang ditangani**	**%**	**100%**	**100 %**	**30.000.000**	**100 %**	**30.000.000**	**100 %**	**30.000.000**	**100 %**	**90.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	**25**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kelompok yang sudah menerima sosialisasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan**	**Kelompok**	2 Lokasi PUD (Perairan Umum Darat)	**3 Kelompok**	**30.000.000**	**4 Kelompok**	**30.000.000**	**5 Kelompok**	**30.000.000**	**5 Kelompok**	**90.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP



			3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Dokumen	2 Lokasi PUD (Perairan Umum Darat)	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	**90.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/ Tahun)	3	25	06			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Konsumsi Ikan**	**Kg/ Kapita/ Tahun**	**31,33 Kg/ Kapita/ Tahun 35**	**31,50 Kg/ Kapita/ Tahun**	**1.050.000.000**	**33 Kg/ Kapita/ Tahun**	**1.050.000.000**	**35 Kg/ Kapita/ Tahun 35**	**1.050.000.000**	**35 Kg/ Kapita/ Tahun 35**	**3.150.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	25	06	2.01		**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro dan Kecil**	**Jumlah Tanda Daftar Usaha (TDU) Pengolahan Hasil Perikanan**	**Dokumen**	**0**	**1 Dokumen**	**30.000.000**	**1 Dokumen**	**30.000.000**	**1 Dokumen**	**30.000.000**	**1 Dokumen**	**90.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	**90.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	25	06	2.02		**Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Tercapainya Kelompok yang sudah mendapatkan Sosialisasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Kelompok**	**0**	**5 Kelompok**	**100.000.000**	**5 Kelompok**	**100.000.000**	**5 Kelompok**	**100.000.000**	**5 Kelompok**	**300.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pemasaran		14/4 23
2.	SEKDIN		14/4 23
3.	Kabid PSDAIK		14/4 23

			3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	Unit Usaha	0	5 Unit Usaha	100.000.000	5 Unit Usaha	100.000.000	5 Unit Usaha	100.000.000	5 Unit Usaha	**300.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	**25**	**06**	**2.03**		**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Data Angka Konsumsi Ikan**	**Pelaku Usaha**	**5 Pelaku Usaha**	**5 Pelaku Usaha**	**920.000.000**	**5 Pelaku Usaha**	**920.000.000**	**5 Pelaku Usaha**	**920.000.000**	**5 Pelaku Usaha**	**2.760.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Ton	31,33 Kg/Kapita/ Tahun	31,50 Ton	820.000.000	33 Ton	820.000.000	35 Ton	820.000.000	35 Ton	**2.460.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP
			3	25	06	2.03	02	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan sekala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang terfasilitasi	Pelaku Usaha	0	5 Pelaku Usaha	100.000.000	5 Pelaku Usaha	100.000.000	5 Pelaku Usaha	100.000.000	5 Pelaku Usaha	**300.000.000**	Bidang Perikanan	Dinas KPP

PARAF KOORDINASI
Tgl.
1. Kabid Pendata 14/4 23
2. SEKDIN 14/4 23
3. Kabid PSDAIK 14/4 23
4.
5.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan, dapat dilihat pada tabel VII.1 berikut :

7.1.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL	TARGET KINERJA			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
					Th-2022	Th-2024	Th-2025	Th-2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan Daerah	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			91,2	88	89	90	90
			Mewujudkan Pemenuhan Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama	300,94	204,77	205,46	206,96	206,96
				2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	3.061	3.050	2.905	2.809	2.809
				-Ketersediaan Energi	118,6	117,5	115,3	110,7	110,7
				-Ketersediaan Protein					
			Mewujudkan Produksi Perikanan Budidaya dan non Budidaya serta Pemenuhan Konsumsi Ikan	1. Jumlah Produksi Ikan Budidaya dan Non Budidaya (Ton)	11.701,85	11.155	11.419	11.435	11.435
				2. Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (%)	4,89	0,54	4,76	6,06	6,06

7.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicators* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut :

7.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel VII.2
Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Th-2022	Th-2024	Th-2025	Th-2026	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	300,94	204,77	205,46	206,96	206,96
2.	Ketersediaan Energi dan protein perkapita	 3.061 118,6	 3.050 117,5	 2.905 115,3	 2.809 110,7	 2.809 110,7
3.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya	11.701,85	11.155	11.419	11.435	11.435
4.	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	4,89	0,54	4,76	6,06	6,06

Tabel VII.3 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Nganjuk

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Output	Rumus Capaian	Data Capaian Tahun Awal Tahun 2022	Target		
					2024	2025	2026
1.	Pangan	1. Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	82,39	89,50	89,75	90,00
		2. Persentase Infrastruktur yang berfungsi dalam mendukung kemandirian pangan	Jumlah Infrastruktur yang Terbangun / Jumlah Target Infrastruktur Daerah x 100%	97,16%	98,11%	99,05%	100%
		3. Persentase Diversifikasi Pangan Lokal	Jumlah Produksi Pangan Lokal (tahun n) / Jumlah Produksi Pangan Lokal *(n-1)* x 100%	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase Sampel Pangan Aman yang dikonsumsi	Jumlah Sampel Pangan Aman / Jumlah Sampel yang diambil x 100%	100%	100%	100%	100%
		5. Persentase Desa Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan / Jumlah Desa Tahan Pangan x 100%	-	9,09%	8,33%	7,57%

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Output	Rumus Capaian	Data Capaian Tahun Awal Tahun 2022	Target		
					2024	2025	2026
2.	Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya + Jumlah Produksi Non Budidaya *(tahun n)* / Target Produksi Daerah x 100%	93%	93%	93,7%	94,6%
		2. Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Jumlah AKI ((tahun n)-(tahun n-1)) / Target AKI x 100%	4,89%	0,54%	4,76%	6,06%
		3. Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang melakukan diversifikasi Usaha (RTP)	Jumlah RTP	537	538	539	540
		4. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha (IUP)	79	80	85	90

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Output	Rumus Capaian	Data Capaian Tahun Awal Tahun 2022	Target		
					2024	2025	2026
		5. Jumlah Pembudidaya Ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses Iptek dan Informasi/dan Penguatan Kelembagaan	Jumlah Pembudidaya Ikan	1.150	1.170	1.180	1.190
		6. Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang diproduksi	Jumlah Benih yang Diproduksi	20.741.303	21.387.000	21.908.000	22.430.000

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001